

Hasil Laporan Evaluasi

Instansi : Badan Tenaga Nuklir Nasional
 Nama Inspektur : Kriswanto, SE
 Waktu Pengisian : 2018-02-06 08:31
 Waktu Pengevaluasian :
 Tahap : Tahap 3 *)
 Tahun Penilaian : 2018

Penilaian		Penjelasan	Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
A. PROSES (60).				55.66	92.76%	
I. Manajemen Perubahan				4.69	93.71%	
1. Tim Reformasi Birokrasi				0.78	78%	
a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A	1		SK Tim RB BATAN Tahun 2017 dan 2018 dan sudah mencakup 8 area perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi
b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	B	0.67		Pelaksanaan RB BATAN sesuai dengan rencana yang terdapat roadmap BATAN 2015-2019 dan Laporan Profil RB Tahun 2017 yang mencakup rencana kerja dan pelaksanaan RB
c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	B	0.67		Laporan Profil Pelaksanaan RB Tahun 2017
2. Road Map Reformasi Birokrasi				1	100%	
a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Dokumen Roadmap BATAN 2015-2019
b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Dokumen Roadmap BATAN 2015-2019 dan sudah mencakup 8 area perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi
c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Dokumen roadmap BATAN 2015-2019 dan Laporan profil RB 2017 telah mencakup "quick win"

	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A	1		Keterlibatan unit kerja sudah tertuang dalam notulen rapat RB, SK Tim RB BATAN dan Roadmap RB BATAN 2015-2019
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A	1		Foto, daftar hadir, agenda acara dan bahan tayang sosialisasi RB pada rakor CAMAT se BATAN tanggal 25 Okt 2017; Sosialisasi RB kepada pegawai baru dalam orientasi pegawai baru
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi					1.91	95.29%	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A	1		SK Tim PMPRB 2017 dan 2018, undangan rapat, koordinasi, dan notulen rapat PMPRB BATAN, jadwal program kerja PMPRB
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A	1		Notulen, daftar hadir dan foto kegiatan Sosialisasi PMPRB, nota dinas sosialisasi LKE PMPRB ke seluruh unit kerja
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	B	0.67		Notulen, daftar hadir dan foto kegiatan Sosialisasi PMPRB Tgl 23 Maret 2016 oleh KemenPAN RB kepada Tim PMPRB dan direncanakan akan dilakukan pelatihan pada pertengahan tahun 2018
	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A	1		Pelaksanaan PMPRB BATAN dilaksanakan sesuai dengan Permenpan No 14 tahun 2014 ditunjukan dalam penyusunan LKE PMRB BATAN dengan 3 tahapan, notulen rapat, daftar hadir, jadwal kegiatan PMPRB BATAN dan SK Tim PMPRB BATAN Tahun 2017 dan 2018
	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A	1		Notulen rapat PMPRB BATAN tahap 1-2-3, daftar hadir dan LKE PMPRB
	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator asesor	A	1		Notulen rapat PMPRB BATAN tahap 1-2-3, daftar hadir dan LKE PMPRB
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A	1		Rencana aksi tindak lanjut RB terdapat dalam Profil RB Tahun 2017 yang dikomunikasikan melalui SITP dan website BATAN
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja					1	100%	

	a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	1		Notulen rapat RB 19 Maret 2018 diadakan oleh Tim RB BATAN, SK Tim RB 2017 dan 2018, SK Tim CAMAT 2017, Workshop CAMAT tgl 25 Oktober 2017, Laporan CAMAT Satker	
	b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A	1		Website BATAN yang dimutakhirkan secara berkala, Sosialisasi melalui pemasangan banner dan spanduk Reformasi Birokrasi di Unit Kerja, serta adanya Cloud BATAN	
	c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A	1		SK Tim CAMAT 2018, Data peserta diklat agen perubahan dari PDL, Laporan pelaksanaan kegiatan pokja manajemen perubahan tahun 2017, Workshop CAMAT tgl 25 Okt 2017, Laporan Profil RB 2017, dan laporan Camat unit kerja	
	Rencana Aksi		Manajemen Perubahan 1. Tim Reformasi Birokrasi 1.a. Dilakukan pembaharuan SK Tim RB setiap tahunnya 1.b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BATAN membuat Laporan Profil RB setiap tahun 1.c. Tim Kerja Monev RB BATAN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana kerja, dan menindaklanjutinya secara berkala 2. Road Map Reformasi Birokrasi 2.c. Secara bertahap menyelesaikan quick win 2.d. Melakukan reuiu Road Map RB 2015-2019 melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja 2.e. Sosialisasi dan internalisasi RB secara terus menerus dilingkungan BATAN 3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 3.b. Aktivitas PMPRB selalu dikomunikasikan ke unit kerja 3.c. Pelatihan untuk tim asesor dilakukan dengan mengundang narasumber 3.d. mengikutsertakan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB 3.f. Pengisian kertas kerja selalu dilakukan dengan konsensus dan seluruh kriteria dibahas dalam rapat koordinasi 3.g. Melaksanakan dan mengkomunikasikan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) 4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 4.a. Melibatkan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.b. Melakukan update website BATAN terkait RB setiap tahun dan mengoptimalkan penggunaan Cloud BATAN 4.c. Mengoptimalkan pemberdayaan agen-agen perubahan yang sudah ada untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan					
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
1. Harmonisasi						1.25	50%	

	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	B	0.5		Dibuktikan dengan: 1. Daftar Identifikasi Peraturan Kepala BATAN; 2. Tabel Pemetaan Peraturan Kepala BATAN; 3. Daftar Hasil Analisa/Rekomendasi Peraturan Kepala BATAN dari Tahun 2000 s.d 2014 sejumlah 66 (enam puluh enam) Peraturan Kepala BATAN. 4. Notulen Rapat Reviu Peraturan Kepala BATAN. 5. Hasil Analisis Keselarasan antara Peraturan yang dibentuk dengan peraturan yg setingkat, peraturan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan untuk tahun 2018.
	b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	B	0.5		Dibuktikan dengan: 1. Daftar regulasi Peraturan Kepala BATAN yang ditetapkan pada tahun 2016 sejumlah 3 (tiga) Peraturan Kepala BATAN. 2. Daftar deregulasi terhadap Peraturan Kepala BATAN Tahun 2016 sejumlah 11 (sebelas) Peraturan Kepala BATAN 3. Daftar regulasi terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2017 sejumlah 7 (tujuh) Peraturan Kepala BATAN. 4. Daftar deregulasi terhadap Peraturan Kepala BATAN Tahun 2017 sejumlah 6 (enam) Peraturan Kepala BATAN.
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan					2.5	100%	
	a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A	1		Dibuktikan dengan: 1. Notulen, daftar hadir rapat koordinasi penyusunan peraturan, naskah konsepsi peraturan dan paraf koordinasi naskah final peraturan 2. SOP Pembentukan Peraturan Kepala BATAN. 3. Permintaan masukan pembentukan Perka BATAN melalui web JDIIH BATAN (Uji Publik).

	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	<p>a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala</p> <p>c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	A	1		Dibuktikan dengan: 1. Notulen evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan Peraturan Kepala BATAN, dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2016; 2. Daftar Hadir sosialisasi SOP Pembentukan Peraturan Kepala BATAN dalam rangka mengingatkan unit kerja terkait SOP tersebut pada tanggal 16 November 2016. 3. Notulen evaluasi SOP Pembentukan Peraturan Kepala BATAN pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan hasil SOP perlu dilakukan revisi pada tahun 2018. 4. Notulen Evaluasi layanan BHHK.(termasuk kepatuhan pelaksanaan SOP Pembentukan Perka BATAN)
	Rencana Aksi		<p>1. a. melakukan harmonisasi lebih intensif terhadap peraturan perundang undangan dengan aturan lain terkait.</p> <p>1. b.</p> <p>- melakukan revisi (deregulasi) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain sejumlah 6 (enam) Peraturan Kepala BATAN di Tahun 2018.</p> <p>- Menyusun peraturan baru guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2.b. Melakukan revisi SOP pembentukan peraturan dan keputusanKepala BATAN.</p>				
III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI					4.68	77.94%	
1. Evaluasi					3	88.89%	
	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	<p>a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi</p>	A	1		1. Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan BATAN 2016 dengan nilai 74,51 (kategori 2 : organisasi BATAN cukup efisien, dimana secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap. 2. SK Tim Evaluasi Organisasi Nomor 124/KA/VI/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Organisasi BATAN Tahun 2017; 3. Notulen rapat pembahasan evaluasi organisasi BATAN, Tanggal 21 Agustus 2017.

	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi</p>	A	1		1. Laporan Evaluasi Kelembagaan BATAN 2016 Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan BATAN 2016 dengan nilai 74,51 (kategori 2 : organisasi BATAN cukup efisien, dimana secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap. 2. SK Tim Evaluasi Organisasi Nomor 124/KA/VI/2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Organisasi BATAN Tahun 2017; 3. Notulen rapat pembahasan evaluasi organisasi BATAN, Tanggal 21 Agustus 2017.
	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja</p>	A	1		1. Laporan Evaluasi Kelembagaan BATAN 2016, 2. Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di BATAN 3. Notulen Rapat Duplikasi Fungsi Unit Kerja.
	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja</p>	B	0.5		1. Hasil Analisis Satuan Organisasi PAIR 2. Naskah Akademik dan izin prinsip pengalihan aset UPT Jepara dari PKSEN ke STTN 3. Ditetapkan Perka BATAN tentang Loka Iradiator Gamma
	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja</p>	B	0.5		1. Dokumen Analisis Organisasi Non Struktural BATAN dan Analisis Pelaksanaan Tugas UPN 2. Hasil evaluasi menunjukkan adanya keharusan pelaporan pengoperasian fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih kepada Kepala PAIR terkait pengoperasian dan Kepala PRFN terkait performance Iradiator

	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja</p>	A	1	1. Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di BATAN. 2. Hasil evaluasi menemukan ada dualisme pertanggungjawaban unit pengamanan loka Iradiator Gamma Merah Putih di Serpong yang harus melaporkan kepada PPIKSN (penguasa pengamanan Kawasan Nuklir Serpong) dan PAIR (sebagai operator Iradiaator) 2. Naskah akademik yang menetapkan PAIR sebagai pengelola Iradiator Gamma Merah Putih 3. Naskah akademik tentang pengalihan Loka Jepara dari PKSEN ke STTN yang akan dioptimalkan untuk sarana pendidikan mahasiswa STTN
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	<p>a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja</p>	A	1	1. Hasil evaluasi kesesuaian struktur yang menangani tugas tertentu berupa Draft Peraturan Kepala BATAN tentang OTK RDE, Instalasi Iradiator, dan Bank Jaringan Riset. 2. Kajian akademis integrasi organisasi STTN dan PSTA utuk memfokuskan tugas fungsi PSTA 3. Telah mendapatkan persetujuan Kemenpan RB dan Perka BATAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Loka Iradiator Gamma 4. Telah ditetapkan Perka BATAN tentang Bank Jaringan, Sel, dan Biomaterial No. 10 Tahun 2017 5. laporan penataan dan penguatan organisasi BATAN tahun 2017
	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya	1	Dokumen Analisis Data Sekunder Instansi BPPT, LIPI
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya	1	1. Draft Perka BATAN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir 2. Hasil evaluasi menyatakan bahwa BATAN mampu adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dengan adanya kegiatan yang bersifat prioritas nasional, yaitu pembangunan Agro Techno Park dan Sains Techno Park, dan pembangunan Iradiator

		2. Penataan			2.01	67%	
	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	B	0.67		1. Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di BATAN 2. Draft OTK Organisasi RDE 3. Draft OTK Instalasi Iradiator 4. Draft OTK STTN 5. Telah ditetapkan Perka OTK Bank Jaringan Riset 6. Telah ditetapkan Keputusan Kepala BATAN tentang Organisasi Pengelola Sarana dan Prasarana Gedung 71
		Rencana Aksi	1. Melakukan evaluasi organisasi sesuai kebutuhan dengan menilai kesesuaian antara struktur organisasi yang ada dengan kinerja yang akan dihasilkan. 2. Melakukan evaluasi terhadap rincian tugas seluruh unit kerja dengan menganalisis antara lain apakah masih ada rincian tugas yang belum tertampung dan yang masih belum tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Menetapkan Draft Perka BATAN tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Nuklir (STTN).				
IV.PENATAAN TATALAKSANA					4.88	97.53%	
		1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama			1.38	91.75%	
	a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A	1		- Proses Bisnis Unit Kerja - Sistem manajemen BATAN yang sudah terintegrasi (lingkup mutu, keselamatan dan lingkungan) dari semua proses bisnis di BATAN.
	b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A	1		- proses bisnis dan keterkaitan dengan SOP yang ada (Daftar SOP seluruh Unit Kerja BATAN)
	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	B	0.67		- laporan audit yang mencakup program audit, rapat kajian manajemen mutu setiap unit kerja, serta audit eksternal - tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal
	d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A	1		- Aplikasi SistemPengendalian Dokumentasi (SIDOKU) - Pedoman evaluasi SOP - Dokumen evaluasi dan kaji ulang SOP serta penyeragaman format bisnis proses seluruh unit kerja - Dokumen kaji ulang manajemen. - Sistem Manajemen BATAN yang akan tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi eksternal (Sukofindo).
		2. E-Government			2	100%	

	a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputerisasi (TIK) BATAN
	b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1		- Portal SIMLIN - fasilitas teleconference - sistem manajemen arsip in aktif (SIMAI), pedoman jadwal retensi arsip (JRA), sistem informasi kerjasama (SISKA)
	c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1		- Website BATAN - Portal SIMLIN BATAN (e-klinik, sistem informasi untuk sertifikasi radiografi) - sistem Pengaduan masyarakat terkait dalam hal pengawasan dan pengelolaan layanan batan - SK Tim jaringan dan website BATAN
	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1		- Sistem layanan BATAN (SILABA) - Portal SIMLIN BATAN contoh pendaftaran online dan pembayaran online PNBPN di PDL, PTKMR, PTLR - SIBERNAS (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) di PSTNT - Ikut serta dalam pemeringkatan e-government Indonesia (PEGI) - penghargaan top IT leadership dan top IT Implementation e-government pada ajang top IT Telco 2017
3. Keterbukaan Informasi Publik					1.5	100%	
	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		Perka BATAN tentang KIP : - Perka Nomor 148/KA/VII/2010), - Perka Nomor 5 tahun 2015 - SK Ka. Batan Nomor 181/KA/KA/IX/2012 ttg organisasi pengelola informasi dan dokumentasi BATAN - SK Ka. Batan Nomor 170/KA/KA/VIII/2014 ttg organisasi pengelola informasi dan dokumentasi BATAN - SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik - SOP Nomor 049.002/HM04/HHK ttg SOP pelaksanaan uji konsekuensi
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A	1		- Website KIP BATAN - Ruang informasi (Information media center)

	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	<p>a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p>	A	1		<p>- Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik - Mendapatkan peringkat ke VI tahun 2016 dari komisi informasi pusat RI terkait keterbukaan informasi publik. - Money uji konsekuensi tahun 2016 dengan hasil SK Sestama nomor 3/SU/VI/2016 ttg daftar informasi publik yang dikecualikan pada Deputi TEN BATAN - Laporan Supervisi tahun 2016 - Laporan evaluasi tahun 2016 - Laporan Layanan Informasi Publik BATAN Tahun 2017 dan Bukti Pengiriman Laporan Kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI - Mendapatkan penghargaan Peringkat I KIP oleh Komisi Informasi Pusat RI</p>
	Rencana Aksi		<p>Rencana Aksi Tahun 2018:</p> <p>1. Proses Bisnis dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan proses integrasi prosedur yang berlaku secara generic. - Peningkatan (baik lingkup maupun jumlah) sertifikasi. <p>2. E-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jenis aplikasi sistem informasi untuk mendukung pelayanan. - Membangun sistem wiki-based ensiklopedia nuklir <p>3. Keterbukaan Informasi Publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi terkait dengan SOP, uji konsekuensi, difokuskan kepada PPIID - Sosialisasi tentang informasi publik difokuskan pada pengelola layanan permohonan informasi - Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik akan selalu dilakukan secara berkala dengan melakukan supervisi langsung ke seluruh unit kerja. 				
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)					14.6	97.32%	
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi					1	100%	
	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	<p>a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan</p> <p>b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan</p> <p>c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan</p> <p>d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan</p>	A	1		<p>1). Dokumen hasil ABK Keputusan Kepala BATAN No. 268/KA/XI/2017 2). Draft informasi jabatan menyesuaikan dengan Peraturan Kepala BATAN nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN 3). Draft dokumen deskripsi kerja seluruh jabatan di BATAN</p>
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	<p>a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi</p> <p>b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi</p> <p>c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi</p> <p>d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan</p>	A	1		<p>1). Dokumen hasil ABK => Keputusan Kepala BATAN No. 268/KA/XI/2017 2). Dokumen Penempatan Pegawai => Keputusan Kepala BATAN No. 238/KA/XII/2015 3). Dokumen rencana kebutuhan pegawai 2015-2019 mengacu pada Keputusan Kepala BATAN Nomor 268/KA/XI/2017</p>

	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1		1). Dokumen Penempatan Pegawai => Keputusan Kepala BATAN No. 238/KA/XII/2015
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1		Dokumen Formasi Pegawai yang telah dimasukkan kedalam e-formasi
	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1		Dokumen Formasi Pegawai yang telah dimasukkan kedalam e-formasi
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN					2	100%	
	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		"Pengumuman Penerimaan Pegawai melalui website BATAN dan website Panselnas penerimaan pegawai"
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Telah melaksanakan rekrutmen pegawai secara online dengan mengikuti sistem baru yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan menggunakan mekanisme test dengan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan CPNS tahun 2017
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Telah melaksanakan rekrutmen pegawai secara online dengan mengikuti sistem baru yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan menggunakan mekanisme test dengan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan CPNS tahun 2017
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Telah melaksanakan rekrutmen pegawai secara online dengan mengikuti sistem baru yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan menggunakan mekanisme test dengan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan CPNS tahun 2017

	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		Telah melaksanakan rekrutmen pegawai secara online dengan mengikuti sistem baru yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan menggunakan mekanisme test dengan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan CPNS tahun 2017
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi					0.84	83.5%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		1) Dokumen standar kompetensi jabatan eselon 2 2) Dokumen draft Standar Kompetensi Jabatan eselon 3 dan eselon 4
	b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai	a. Telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asesmen kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan asesment pegawai	B	0.67		1) Dokumen asesmen terhadap 4 PTM dan 23 PTP serta 29 pejabat administrasi 2) dokumen asesmen pegawai BATAN tahun 2016 yang dilakukan terhadap 22 pegawai BATAN kandidat pejabat eselon 3 dan 4 3) Dokumen asesmen terhadap 24 orang untuk mengisi posisi 6 PTP di tahun 2017
	c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	B	0.67		Data identifikasi keperluan kebutuhan kompetensi PTM, PTP dan Pejabat administrasi
	d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A	1		1) Dokumen rencana diklat fungsional, diklat Teknis, dan diklat PIM 2) Pemanfaatan Sistem Informasi Pelatihan (SILAT) untuk perencanaan pengembangan kompetensi seluruh pegawai 3) Dokumen perencanaan pelatihan untuk setiap bidang keahlian 4) Panduan pengembangan kompetensi
	e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	B	0.67		1) Laporan pelaksanaan pelatihan Tahun 2017 2) Pemanfaatan Sistem Informasi Pelatihan (SILAT) untuk perencanaan pengembangan kompetensi seluruh pegawai 3) Dokumen rencana pengembangan pegawai berbasis kompetensi

	f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		1) Dokumen evaluasi pemanfaatan diklat Pegawai; 2) Dokumen perencanaan peserta diklat dan realisasi peserta diklat 3) Pemanfaatan SILAT untuk monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka					6	100%	
	a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya	1		Dokumen open recruitment dan website BATAN
	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A	1		Dokumen open recruitment dan website BATAN
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya	1		Dokumen open recruitment dan website BATAN
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya	1		Dokumen open recruitment dan website BATAN
	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya	1		Dokumen open recruitment dan website BATAN
5. Penetapan kinerja individu					1.76	88.14%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	A	1		Aplikasi SIKAP
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		1). Dokumen penilaian prestasi kerja pegawai
	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	A	1		Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	C	0.5		Dokumen penilaian SKP secara periodik semesteran
	e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	A	1		Dokumen hasil evaluasi/penilaian kinerja Pegawai secara periodik semesteran

	f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	B	0.67		SOP Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
	g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	A	1		Draft Peraturan Kepala BATAN tentang Tunjangan Kinerja
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai					1	100%	
	a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Perka BATAN No 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai dan Perka BATAN No 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN
	b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A	1		Perka BATAN No 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai dan Perka BATAN No 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN - Laporan hukuman disiplin
	c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi disiplin
	d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada unit organisasi	A	1		- pemberian sanksi : laporan evaluasi disiplin pemberian; - reward : Laporan BATAN Quality Award diselenggarakan setiap tahun dan pemberian penghargaan pegawai teladan
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan					1	100%	
	a	Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		Draft Informasi Faktor Jabatan BATAN yang disesuaikan dengan Perka BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang OTK BATAN
	b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		Peta Jabatan (Dlm Aplikasi SIANJAB)
	c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A	1		Perka BATAN Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Kelas Jabatan

8. Sistem Informasi Kepegawaian				1	100%	
a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		Aplikasi SIM SDM dan SIK pada portal SIMLIN
b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		Aplikasi SIM SDM dan SIK pada portal SIMLIN
c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A	1		1) Aplikasi SIM SDM dan SIK pada portal SIMLIN 2) Notula rapat integrasi sistem informasi SDM, SILAT, SISKAS, dan portal NKM
d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1		Notula rapat koordinasi Baperjakat

	<p>Rencana Aksi</p>	<p>1.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 1. a. - Secara berkala melakukan evaluasi Anjab dan ABK - Menetapkan dokumen informasi jabatan menyesuaikan dengan Peraturan Kepala BATAN nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN - Menetapkan dokumen deskripsi kerja seluruh jabatan di BATAN 1. b.- Secara berkala melakukan evaluasi perhitungan kebutuhan pegawai - Melakukan revisi dokumen penempatan pegawai sesuai dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 268/KA/XI/2017 1. c. - Secara berkala melakukan evaluasi penempatan pegawai - Melakukan revisi dokumen penempatan pegawai sesuai dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 268/KA/XI/2017 1. d. secara berkala melakukan evaluasi proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun 1. e. secara berkala melakukan evaluasi formasi pegawai 2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN 2. a. secara berkala melakukan evaluasi terhadap Pengumuman Penerimaan Pegawai melalui website BATAN dan website Panselnas penerimaan pegawai setiap ada formasi pegawai baru dari Menpan-RB 2. b. secara berkala melakukan evaluasi terhadap pendaftaran CPNS 2. c. secara berkala melakukan evaluasi terhadap persyaratan CPNS 2. d. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses seleksi CPNS 2. e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengumuman hasil seleksi penerimaan CPNS 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 3. a. - Secara berkala melakukan evaluasi standar kompetensi jabatan - Pengajuan dokumen standar kompetensi jabatan eselon 2 menjadi Peraturan Kepala BATAN - Finalisasi dokumen standar kompetensi jabatan eselon 3 dan 4 di Sekretariat Utama 3. b. secara berkala melakukan assesment terhadap sebagian besar pegawai 3. c. secara berkala melakukan evaluasi identifikasi pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai 3. d. - secara berkala melakukan evaluasi perencanaan diklat PIM, diklat fungsional dan diklat Teknis - Pemberitahuan berkala kepada seluruh unit kerja untuk merencanakan pengembangan kompetensi. - Secara berkala memutakhirkan daftar pelatihan untuk seluruh bidang keahlian. 3. e. - secara berkala melakukan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi - Pemberitahuan berkala kepada seluruh unit kerja untuk merencanakan pengembangan kompetensi. 3. f. - secara berkala melakukan evaluasi pemanfaatan diklat - Pemberitahuan berkala kepada seluruh unit kerja mengenai realisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi 4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e. secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi terbuka JPT BATAN 5. Penetapan kinerja individu 5. a. secara berkala melakukan evaluasi terhadap penerapan peneapan kinerja individu 5. b. - secara berkala melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi - menyusun draft indeks profesional ASN 5. c. secara berkala melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja individu 5. d. secara berkala melakukan evaluasi penilaian SKP secara periodik semesteran 5. e. secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja Pegawai 5. f. secara berkala melakukan evaluasi terhadap SOP Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 5. g. - Finalisasi Peraturan Kepala BATAN tentang pemberian tunjangan kinerja 6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 6. b. secara berkala melakukan evaluasi implementasi Perka BATAN No 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai dan Perka BATAN No 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN 6. c. secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan monitoring dan evaluasi disiplin 6. d. sosialisasi untuk seluruh unit kerja memberikan penghargaan kepada pegawai teladan 7. Pelaksanaan evaluasi jabatan 7. a. secara berkala melakukan evaluasi terhadap IFJ 7. b. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap peta jabatan 7. c. secara berkala melakukan evaluasi terhadap kelas jabatan 8. Sistem Informasi Kepegawaian 8a, 8b, 8c secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian dan mengembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan 8c. Mengembangkan konsep integrasi sistem informasi</p> <p>-----</p> <p>Rekomendasi Kemenpan-RB: a. Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai. b. Memperbaiki rumusan perjanjian kinerja individu secara berjenjang yang berorientasi hasil dan terukur, agar kinerja individu dapat mendukung pencapaian kinerja atasan dan organisasi. c. Mendorong tumbuhnya budaya kinerja dalam organisasi dengan cara mengkaitkan pemberian tunjangan kinerja dengan hasil kinerja masing-masing unit kerja maupun kinerja individu pegawai.</p>				
	<p>VI. Penguatan Akuntabilitas</p>		5.74	95.6%		
	<p>1. Keterlibatan pimpinan</p>		2	100%		

	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1		Renstra BATAN, Renstra Deputi, Sestama, dan Eselon II sudah ada dan dapat dilihat pada SIPL online - notulen rapat penyusunan renstra
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Dokumen Perjanjian Kinerja BATAN, Deputi, Sestama, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta dokumen PK tersebut dapat dilihat pada aplikasi SIPL2 secara online - Notulen rapat penyusunan Penetapan Kinerja. - FGD
	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		Pemantauan Progres Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada aplikasi SIPL2 secara online
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					3.74	93.4%	
	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	B	0.67		Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2017 sesuai surat Nomor 232/REN 3/OT 02 02/02/2018, tanggal 5 Februari 2018 untuk penyusunan Lakin 2017 beserta bimbingan teknis
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1		Perka BATAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, tanggal 28 Januari 2016
	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	A	1		Pengukuran Kinerja eselon I dan Eselon II dapat dilihat pada Aplikasi SIPL2 secara online pada Menu Rencana Aksi PK dan Menu Progres PK.
	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A	1		Melalui Aplikasi SIPL2 secara online semua unit kerja dapat mengakses secara langsung.
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A	1		Pada SIPL terdapat: (1) Laporan Realisasi anggaran dan Fisik setiap bulan (2) Laporan Kemajuan/Progres PK (Perjanjian Kinerja), (3) Laporan Output/Suboutput setiap triwulan
	Rencana Aksi		- Melakukan reuiu atas pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan yang baru (jika ada) - Melakukan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja pada Sistem Informasi Perencanaan Litbangyasa 2 (SIPL2) - Mempertahankan penyusunan perjanjian kinerja level Eselon III dan Eselon IV yang sudah dimulai pada tahun 2017 - Indikator kinerja tujuan akan dirumuskan pada draft Renstra BATAN 2020-2024 - Penyusunan ukuran kinerja pada level lembaga dan level unit di bawahnya yang belum berorientasi pada hasil akan dirumuskan pada draft Renstra BATAN 2020-2024				
VII. Penguatan Pengawasan					11.5	95.85%	

1. Gratifikasi				1.5	100%	
a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Perka BATAN No. 8 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di BATAN dan SOP Penanganan Gratifikasi
b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A	1		Telah dilaksanakan sosialisasi dengan peserta seluruh Kabag.Tu dan PPK di BATAN, Bahan presentasi, daftar hadir dan foto, Website BATAN, Banner, surat Laporan gratifikasi dan buklet "No Gratifikasi"
c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya	1		Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi
d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya	1		Laporan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi
e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya	1		Laporan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi
2. Penerapan SPIP				1.5	100%	
a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		1. Perka tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BATAN 2. Perka tentang pedoman evaluasi penerapan SPIP di BATAN
b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		- Telah dibentuk Satgas SPIP dimasing-masing unit kerja - Terdapat Laporan Diagnostik Assesment
c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	A	1		Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A	1		Laporan Kemajuan RTP
e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A	1		- Telah dibentuk Satgas SPIP dimasing-masing unit kerja - Laporan Kemajuan RTP
f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		1. Surat permintaan Kemajuan RTP ke unit kerja 2. Laporan Evaluasi Penerapan SPIP 3. Nilai Maturitas SPIP berada pada Level 3
3. Pengaduan Masyarakat				2	100%	

	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		Perka BATAN No. 3 Tahun 2015 tentang penanganan pengaduan masyarakat di BATAN
	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A	1		- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 7 Juli 2015 dengan peserta seluruh Kabag.Tu dan PPK di BATAN,Website BATAN, Bahan presentasi, daftar hadir dan foto - Sosialisasi pada acara workshop PPI tgl 17April 2018
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A	1		Laporan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
4. Whistle-Blowing System					1.5	100%	
	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		1. Perka BATAN No. 4 Tahun 2015 tentang pedoman sistem pelaporan pelanggaran (WBS) di BATAN 2. SOP pelaporan pelanggaran 3. Aplikasi WBS di PORTAL SIMLIN
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	A	1		- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 3 Desember 2016 dengan peserta seluruh Kabag.Tu, ULP, Pejabat pengadaan dan PPK di BATAN,Website BATAN dan banner, Bahan presentasi, daftar hadir dan foto -Telah dilakukan sosialisasi aplikasi WBS pada 25 Januari 2018
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya	1		Laporan pelaksanaan kegiatan WBS dan telah di bangun aplikasi WBS dalam portal Simlin
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A	1		Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan WBS
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A	1		Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan WBS
5. Penanganan Benturan Kepentingan					1.5	100%	
	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya	1		Surat Edaran Sestama Nomor 02/SU/WP00./2015 tentang penanganan benturan kepentingan

	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A	1		Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 7 Juli 2015 dengan peserta seluruh Kabag.Tu dan PPK di BATAN,Website BATAN, Bahan presentasi, daftar hadir dan foto
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya	1		Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	A	1		Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan
	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	A	1		Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas					2.25	90%	
	a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Penancangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Perka BATAN No. 13 Tahun 2014 tentang pedoman penetapan WBK dan WBBM di BATAN disesuaikan dengan PermenPAN-RB nomor 60 tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya	1		-Nota dinas pengisian LKE secara mandiri oleh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan PNBK. -Surat usulan 3 unit kerja untuk dinilai berpredikat WBK (PTLR, Pusdiklat, PRSG) Ke MenpanRB
	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A	1		1. SOP Zona Integritas 2.Laporan pembangunan Zona Integritas di unit kerja
	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		LKE WBK seluruh unit kerja yang menyelenggarakan PNBK
	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	B	0.5		-Surat usulan 3 unit kerja untuk dinilai berpredikat WBK (PTLR, Pusdiklat, PRSG) Ke MenpanRB - Sertifikat penetapan unit kerja berpredikat WBK untuk unit kerja PTLR
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					1.25	83.5%	

	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A	1		Laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A	1		1. Sertifikat fungsional dan pelatihan teknis 2. Hasil penilaian kapabilitas APIP berada pada level 3 3. Telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan analisis risiko.
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	B	0.67		DIPA Inspektorat
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	B	0.67		Sertifikat diklat ABR dan sebagian besar PKPT disusun berdasarkan analisis risiko
	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratifikasi secara berkala dan berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan SPIP <ul style="list-style-type: none"> - secara berkala dan berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan penerapan SPIP - Secara bertahap setiap kegiatan akan dilakukan penilaian resiko dan membuat laporan RTP - Secara bertahap meningkatkan nilai maturitas SPIP ke level selanjutnya 3. Pengaduan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - secara berkala dan berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat - Menyusun SOP Pengaduan Masyarakat 4. Whistle Blowing System <ul style="list-style-type: none"> - secara berkala dan berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap penerapan Whistle Blowing System 5. Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap penanganan benturan kepentingan 6. Pembangunan Zona Integritas <ul style="list-style-type: none"> - secara berkala dan berkelanjutan akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap pembangunan Zona Integritas - Mengusulkan 3 (tiga) unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK. - Mengusulkan unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK menjadi WBBM 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) <ul style="list-style-type: none"> - Secara berkala setiap auditor diikutkan dalam diklat substantif pengawasan - Secara bertahap akan melaksanakan audit berbasis resiko - Meningkatkan kapabilitas APIP ke level selanjutnya - Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) 				
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					5.83	97.23%	
1. Standar Pelayanan					0.9	90%	
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Surat Edaran Sestama No 2 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik

	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	A	1		Bukti maklumat pelayanan PNPB dan Surat Edaran Sestama No 2 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1		SOP pelayanan di Unit-unit kerja penyelenggara
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0.5		Telah diterbitkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik yang merupakan perubahan dari Peraturan Kepala BATAN Nomor 212/KA/XII/2011 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan BATAN berdasarkan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
	e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	A	1		Laporan Audit internal dan eksternal unit kerja penyelenggara layanan
2. Budaya Pelayanan Prima					0.93	93.4%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	B	0.67		Laporan kegiatan workshop petugas pelayanan informasi pelatihan teknis pelayanan publik
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		Melalui website unit kerja penyelenggara layanan publik dan portal Sistem informasi layanan BATAN (facebook, twitter, radio, media cetak, tv, digital clipping)
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		SOP pelayanan yang berkaitan dengan reward/punishment bagi pelaksana layanan (Surat Edaran Sestama No 2 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik)
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A	1		Aplikasi Sistem Layanan BATAN (SILABA)
	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		- STTN (1 inovasi) - PTLR (2 inovasi) - PUSDIKLAT (Aplikasi diklat berbasis android)
3. Pengelolaan Pengaduan					1.5	100%	

	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1		Web BATAN, Media pengaduan pelayanan, media pengaduan berbasis android
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1		SOP Pelayanan Pengaduan di unit kerja penyelenggara layanan
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1		pengelolaan pengaduan pelayanan dilaksanakan oleh petugas humas/PPI dan unit pengaduan di setiap layanan BATAN.
	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A	1		Laporan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan pada seluruh unit kerja penyelenggara layanan
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1		Bukti tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan					1.5	100%	
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		IKM 2017 senilai 3,23 (LAKIN BATAN Tahun 2017)
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya	1		Aplikasi SILABA dalam Portal SIMLIN
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		Laporan Kaji Ulang Manejemen dari seluruh unit kerja
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi					1	100%	
	a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1		Aplikasi SILABA dalam Portal SIMLIN (sibaja, e-reposito ri, Sinoba, sipras)
	b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A	1		Aplikasi SILABA dalam Portal SIMLIN
	c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		Aplikasi SILABA dalam Portal SIMLIN serta Meningkatkan inovasi layanan dengan selalu mengikuti kompetisi layanan publik melalui aplikasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)

	Rencana Aksi	<p>1. Standar Pelayanan</p> <p>1.a. Memantau implementasi penerapan Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik secara berkala.</p> <p>1.b. Mengevaluasi kinerja unit kerja layanan publik secara berkala yang telah diterapkan pada seluruh jenis layanan.</p> <p>1.c. Mengevaluasi SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan secara berkala.</p> <p>1. d. Melakukan revidi atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik secara berkala.</p> <p>2. Budaya Pelayanan Prima</p> <p>2.a. Akan dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) untuk seluruh pelaksana layanan</p> <p>2b. Memperbaharui Informasi tentang pelayanan sehingga tetap mudah diakses melalui berbagai media</p> <p>2c. Mengevaluasi sistem pemberian sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar</p> <p>2d. Mengembangkan aplikasi SILABA sebagai media terintegrasi untuk mempercepat akses pelayanan pengaduan</p> <p>2e. Meningkatkan inovasi penyelenggara layanan dengan selalu mengikuti kompetisi layanan publik</p> <p>3. Pengelolaan Pengaduan</p> <p>3a. Memantau pengaduan pelayanan secara berkala</p> <p>3b. Melakukan review SOP pengelolaan pengaduan secara berkala</p> <p>3c. Meningkatkan media pengaduan pelayanan</p> <p>3d. Meningkatkan respon atas pengaduan dengan cepat dan tepat secara online melalui portal Sistem Informasi Layanan (SiLaBa) BATAN.</p> <p>3e. Melakukan Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala (kaji ulang manajemen)</p> <p>4. Penilaian Kepuasan terhadap Layanan</p> <p>4a. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala</p> <p>4b. Selalu mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat ke dalam website BATAN dan SILABA</p> <p>4c. Menindaklanjuti seluruh hasil survey kepuasan masyarakat</p> <p>5. Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>5a. Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan secara terus menerus, contohnya dengan pengembangan aplikasi silaba</p> <p>5b. Menerapkan teknologi informasi untuk seluruh layanan di BATAN, dan terintegrasi pada SILABA</p> <p>5c. Melakukan pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan secara terus menerus.</p>				
B. HASIL				33.41	83.52%	
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI				15.84	79.19%	
	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	74.56	10.44		Hasil evaluasi AKIP dari Kemenpan-RB tahun 2017
	2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	4.5	5.4		dokumen survei integritas internal tahun 2017
	Rencana Aksi	<p>1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIN BATAN oleh KEMENPAN RB tahun 2017</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil survei internal tahun 2017</p>				
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN				9.2	91.95%	
	1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	3.54	6.195		hasil survei persepsi anti korupsi oleh Kemenpan-RB tahun 2017
	2. Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelasan Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	3		Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LK BATAN Tahun 2016
	Rencana Aksi	<p>1. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil survei eksternal persepsi korupsi tahun 2017</p> <p>2. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian</p>				
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				8.38	83.75%	
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	3.35	8.375		hasil survei persepsi pelayanan oleh Kemenpan-RB tahun 2017
	Rencana Aksi	Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2017				

